

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Selama era Orde Baru atau era pemerintahan Presiden Soeharto (1966-1998) Indonesia mengalami sebuah proses pembangunan ekonomi yang pesat dengan laju pertumbuhan ekonomi rata-rata per tahun hingga 8 persen. Pemerintah saat itu juga dapat dikatakan berhasil mengurangi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan lewat antara lain, pembangunan ekonomi perdesaan berdasarkan modernisasi, intensifikasi pertanian, dan industrialisasi. Dengan pencapaian tersebut, Indonesia sempat dijuluki oleh Bank Dunia sebagai salah satu “macan asia” bersama-sama dengan dua Negara tetangga, yakni Malaysia dan Thailand (Tambunan, 2016).

Namun demikian, pencapaian kinerja perekonomian nasional tersebut pada tingkat makro menyembunyikan sejumlah persoalan. Strategi pembangunan ekonomi yang diterapkan pemerintah menciptakan inefisiensi dan distorsi pasar, baik pasar output maupun pasar input. Walaupun baru disadari setelah dilanda krisis keuangan Asia pada 1997/1998, strategi pembangunan ekonomi orde baru menciptakan biaya ekonomi yang sangat tinggi dan memperbesar jurang antara kaum miskin dan kaum kaya. Dengan kata lain, selama era orde baru, strategi pembangunan yang dipilih menciptakan pola pembangunan ekonomi yang eksklusif atau hanya untuk kelompok-kelompok masyarakat dan pengusaha tertentu (Tambunan, 2016).

Krisis keuangan Asia pada 1997/1998 mengakibatkan ekonomi nasional mengalami resesi besar yang menyebabkan laju pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) jadi negatif hingga 13 persen pada tahun 1998. Akibatnya, pendapatan riil masyarakat per kapita merosot

tajam yang dibarengi dengan peningkatan pesat jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan. Kemudian, pasca krisis 1997/1998, Indonesia juga membuat banyak kemajuan khususnya dalam bidang ekonomi. PDB riil sejak akhir dekade 1990-an setelah sempat tumbuh negatif melebihi 10 persen kembali ke teritori positif dan mencapai rata-rata per tahun antara 5 hingga 6 persen sejak tahun 2002, walaupun belum mampu menyamai pencapaian pertumbuhan ekonomi semasa orde baru yang rata-rata 8 persen (Tambunan, 2016).

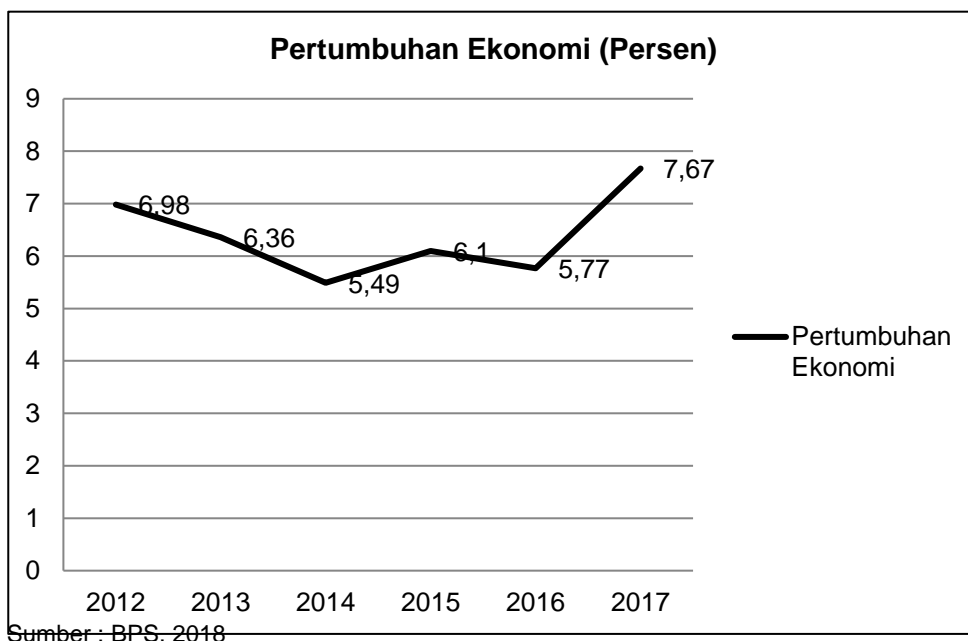
Perekonomian Indonesia relatif terus tumbuh dengan baik selama lebih dari satu dekade terakhir dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita tahunan mencapai 5,06% pada tahun 2014. Pencapaian ini juga didukung oleh tren penurunan persentase masyarakat miskin sejak awal tahun 2000-an hingga tahun 2014, Badan Pusat Statistik (dalam Azwar, 2016). Terlepas dari kesuksesan pencapaian pertumbuhan ekonomi dan target pengurangan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir, nyatanya masih terdapat perbedaan yang sangat besar dalam hal jumlah masyarakat miskin di beberapa kawasan kepulauan Indonesia. Kemiskinan di Kawasan Timur Indonesia menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kawasan Barat Indonesia (Azwar, 2016).

Lima daerah tertinggi menurut tingkat kemiskinan pada kawasan ini adalah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Gorontalo. Sementara itu, pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi di Indonesia ternyata menimbulkan kesenjangan pendapatan yang tinggi. Sebagai akibatnya, koefisien Gini Ratio Indonesia semakin meningkat sejak tahun 2002 sebesar 0,33 menjadi 0,408 pada tahun 2015, Badan Pusat Statistik (dalam Azwar, 2016). Di sisi lain, kesenjangan pencapaian pembangunan antar provinsi juga semakin besar. Dengan begitu luasnya wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau dan kepulauan, permasalahan kurangnya pemerataan pembangunan khususnya antara Kawasan Barat dan Timur Indonesia telah muncul sejak lama. Pembangunan yang didominasi pada provinsi-provinsi yang termasuk dalam Kawasan Barat Indonesia, membuat pembangunan di Kawasan Timur Indonesia relatif masih jauh tertinggal (Azwar, 2016).

Data BPS menunjukkan bahwa 80-an persen PDB Indonesia didominasi oleh provinsi-provinsi di Kawasan Barat Indonesia, sedangkan sisanya terdistribusi di seluruh provinsi pada

Kawasan Timur Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2016). Hal ini didukung oleh Sholihah (dalam Azwar, 2016) yang dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa fenomena pertumbuhan inklusif dalam menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan, dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja lebih banyak terjadi di Kawasan Barat Indonesia. Padahal menurut Todaro (dalam Azwar, 2016), masalah fundamental bukan hanya menumbuhkan PDB, tetapi lebih kepada siapa yang akan menumbuhkan PDB tersebut, sejumlah orang yang ada dalam suatu negara atautkah hanya segelintir orang saja. Jika hanya segelintir orang yang menumbuhkan PDB atautkah orang-orang kaya yang jumlahnya sedikit, maka manfaat dari pertumbuhan PDB itu pun hanya dinikmati oleh mereka saja sehingga kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pun akan semakin parah. Untuk itu hal yang paling penting dalam pertumbuhan adalah siapa yang terlibat dalam pertumbuhan ekonomi tersebut atau dengan kata lain adalah tingkat kualitas pertumbuhan tersebut (Azwar, 2016).

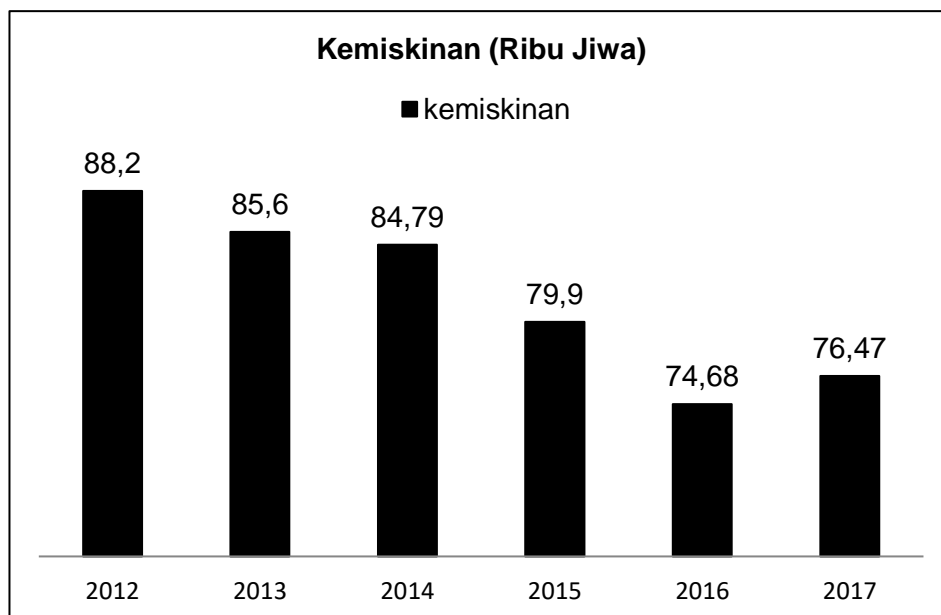
**Gambar1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Maluku Utara**



Di Provinsi Maluku Utara sendiri laju pertumbuhan ekonomi berapa tahun terakhir terlihat cukup bagus, walau sempat turun pada angka 5,49% pada tahun 2014 dimana sebelumnya berada pada angka 6,36% & 6,98% pada tahun 2012 dan 2013. Kemudian pada tahun berikutnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan trend yang baik dimana pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara mencapai angka 7,67%. Pencapaian ini

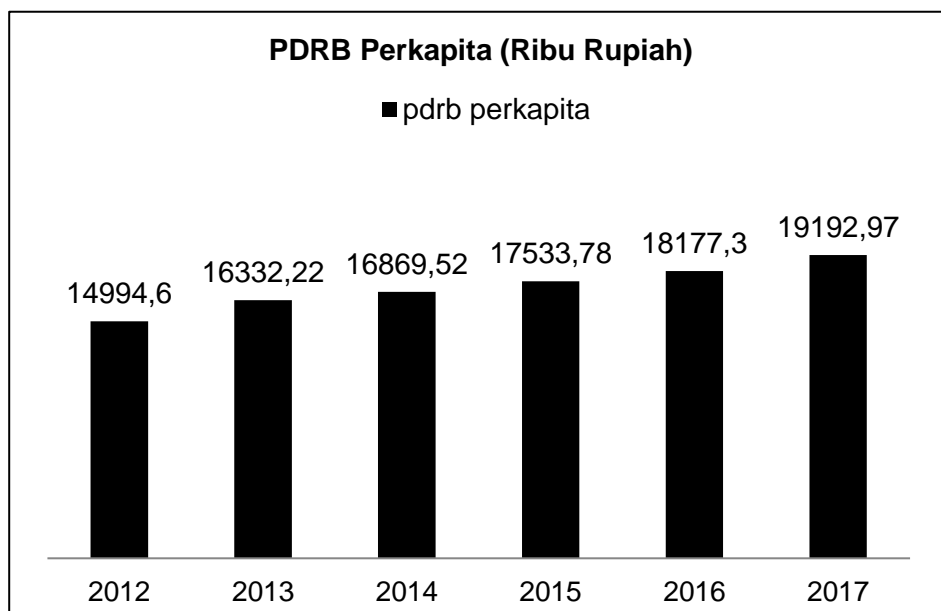
juga didukung oleh jumlah kemiskinan yang relatif menurun sejak tahun 2012 hingga tahun 2018. Dan juga pendapatan perkapita masyarakat pada beberapa tahun terakhir yang menunjukkan tren positif.

**Gambar 1.2 Tingkat Kemiskinan Provinsi Maluku Utara**



Sumber : BPS, 2019

**Gambar 1.3 PDRB Perkapita Provinsi Maluku Utara**



Sumber : BPS, 2019

Fakta tersebut tentunya menjadi sinyal akan pentingnya upaya dan peran pemerintah dalam terus merancang dan menciptakan konsep yang lebih luas yang berkenaan dengan pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan seluruh segmen masyarakat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi khususnya dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan (inklusif), (Azwar, 2016). Hal ini sebagaimana yang disebutkan oleh Klasen (dalam Azwar, 2016) bahwa pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang dapat melibatkan partisipasi semua pihak tanpa diskriminasi dan mampu melibatkan seluruh sektor ekonomi. Dalam hal ini, konsep pertumbuhan inklusif itu berkaitan erat dengan konsep pertumbuhan yang pro poor. Dengan kata lain, berdasarkan hasil yang dicapainya, pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang mampu menurunkan jumlah kelompok yang “tidak diuntungkan” (marginal) dalam perekonomian.

Meskipun bukan lagi menjadi isu yang terbilang baru, pertumbuhan inklusif selalu menjadi pembahasan yang menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk para peneliti dan pemegang kebijakan terkait. Berbagai indikator yang mencirikan pertumbuhan inklusif terus dikembangkan, termasuk bagaimana metode mengukur pertumbuhan inklusif. Namun, kajian dan referensi yang berfokus pada analisis pengukuran inklusi pertumbuhan ekonomi, masih terbatas pada scope nasional yang relatif cukup besar dan luas. Kajian inklusifitas pertumbuhan ekonomi pada tingkat regional (daerah) dirasakan masih sangat minim dan menjadi salah satu poin yang dapat menyebabkan upaya pemerintah dalam kasus ini menjadi kurang optimal. Hal ini mengakibatkan pemahaman dan wawasan tentang dinamika ini menjadi terbatas, sehingga seyogyanya menjadi agenda yang sangat penting untuk diprioritaskan (Azwar, 2016).

Berbagai konsep yang ditawarkan untuk merumuskan pertumbuhan inklusif memiliki pandangan masing-masing mengenai bagaimana seharusnya pertumbuhan dapat bekerja

dalam perekonomian. Faktor-faktor seperti ketimpangan, kemiskinan, masalah sektoral dan tenaga kerja seringkali disebutkan dalam uraian mengenai berbagai konsep pertumbuhan inklusif. Pertumbuhan inklusif dapat dikatakan sebagai ukuran apakah pertumbuhan ekonomi suatu negara merupakan pertumbuhan yang berkualitas. Pertumbuhan ekonomi disebut inklusif apabila pertumbuhan tersebut mampu menurunkan kemiskinan, menurunkan ketimpangan distribusi pendapatan, dan menyerap lebih banyak tenaga kerja (Sholihah *et. al*, 2016).

Mengenai dengan pertumbuhan inklusif itu sendiri, sudah ada beberapa peneliti yang meneliti tentang pertumbuhan inklusif. Misalkan penelitian yang dilakukan oleh Sholihah (2014) dengan judul ““Pertumbuhan Inklusif: Faktor-faktor yang Mempengaruhi dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Kelas Menengah Di Indonesia””. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2008-2012 tidak inklusif, kemudian pertumbuhan inklusif bukan fenomena yang konsisten di Indonesia dan juga fenomena pertumbuhan inklusif lebih banyak terjadi di wilayah Indonesia bagian barat. Dan hasil yang sama juga diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh Sholihah, *et. al* (2016) dengan judul “Pertumbuhan Inklusif: Fenomena Pertumbuhan Inklusif di Kawasan Indonesia Bagian Barat dan Indonesia Bagian Timur”.

Pada tahun 2016, Azwar juga melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pertumbuhan Inklusif Di Provinsi Sulawesi Selatan dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya”. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa, melalui metode PEGR dari seluruh periode penelitian nilai total koefisien pertumbuhan inklusif tidak pernah mencapai tingkat pertumbuhan yang inklusif. Kemudian Balai Statistik Daerah-Bappeda DIY dan BPS DIY juga melakukan penelitian tentang pertumbuhan inklusif dengan judul “Analisis Pertumbuhan Inklusif Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari penelitian ini ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta memuaskan tapi belum inklusif, pertumbuhan ekonomi relatif selaras dengan pengurangan kemiskinan, pengangguran.

Sejalan dengan permasalahan ini, maka dalam penulisan ini di lakukan penelitian tentang pertumbuhan inklusif khususnya di provinsi Maluku Utara. Dalam penelitian ini,

pertumbuhan inklusif didefinisikan menggunakan indikator pendekatan kemiskinan. Sehingga suatu pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan inklusif apabila dapat dirasakan atau mampu menurunkan kemiskinan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan pernyataan penelitian sebelumnya yang diuraikan di atas, maka dapat di rumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

Apakah pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara telah inklusif?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Menganalisis inklusifitas pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku Utara

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan pengetahuan bagi masyarakat Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi untuk peneliti selanjutnya demi pengembangan ilmu pengetahuan.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan kepada pihak pemerintah khususnya Pemerintah Provinsi Maluku Utara, dalam rangka untuk lebih jeli dalam melihat berbagai fenomena menyangkut dengan pertumbuhan inklusif.